

PEMAPARAN DATA PENELITIAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaedi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris)¹.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlul sunnah wal Jama'ah. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:

[illegible]

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlul sunnah Wal Jama'ah².

Di Jakarta pada bulan Desember 1955, berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang dipelopori oleh Wa'il Harits Sugianto. Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan

[illegible]

ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU.

Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Mukktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU.

Oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantiasa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga

[illegible]

Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat itu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari 'P' apakah perhimpunan atau persatuan.

c. Proses Independensi PMII

³Buku Panduan Kaderisasi Formal Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya, Materi Sejarah PMII, 2013.

maupun fungsional. Selanjutnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim neo-fasis Orde Baru mulai mengkerdikan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. 14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII.

Namun, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak lepas dari faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja PMII membedakan diri dengan organisasi lain. Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan⁴.

⁴Buku Panduan Kaderisasi Formal Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya, Materi Sejarah PMII, 2013.

integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (*civilized*). Sedangkan pengertian Indonesia adalah masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideology bangsa (Pancasila) serta UUD

Organisasi ini kini berkembang sangat pesat dan memiliki struktur mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat fakultas di masing-masing kampus di Indonesia. Struktur tertinggi organisasi ini disebut Pengurus Besar (PB PMII), ditingkat regional ada Pengurus Koordinator Cabang (PKC PMII), ditingkat kota atau kabupaten adalah Pengurus Cabang (PC PMII), ditingkat kampus atau perguruan tinggi adalah Pengurus Komisariat (PK PMII) dan ditingkat fakultas adalah Pengurus Rayon (PR PMII).

Adapun tujuan organisasi PMII didirikan yaitu “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan

Dalam struktur organisasi di PMII sebagai mana tercantum di atas, PMII UIN Sunan Ampel Surabaya disebut sebagai Pengurus Komisariat⁷, dimana ruanglingkupnya berada di sector kampus atau perguruan tinggi. PMII UIN Sunan Ampel Surabaya membawahi 5 Pengurus Rayon yaitu:

Dalam struktur organisasi di PMII sebagai mana tercantum di atas, PMII UIN Sunan Ampel Surabaya disebut sebagai Pengurus Komisariat⁷, dimana ruanglingkupnya berada di sector kampus atau perguruan tinggi. PMII UIN Sunan Ampel Surabaya membawahi 5 Pengurus Rayon yaitu:

PMII UIN Sunan Ampel Surabaya membawahi 5 Pengurus Rayon yaitu:

7 Anggaran Rumah Tangga PMII, BAB IV tentang Struktur Organisasi Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang, Bagian II, Susunan, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pengurus, Pasal 16 ayat (1) Komisariat dapat dibentuk disetiap perguruan tinggi; (2) Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon; (3) Dalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 orang; (4) Komisariat dan Pengurus Komisariat (PK) dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang; (5) Masa jabatan PK adalah setahun; (6) PK merupakan perwakilan rayon diwilayah kordinasinya; (7) PK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Eksternal dan Ketua Kajian Gender dan Emansipasi Perempuan, Sekretaris sebanyak 3 (tiga), Bendahara dan Wakil Bendahara; (8) Bidang Internal meliputi : Kaderisasi dan Pembinaan Sumber Daya Anggota, Pendayagunaan Aparatur dan Potensi Organisasi, dan Kelembagaan serta Kajian Intelektual; (9) Bidang Eksternal meliputi : Komunikasi dengan Pihak Instansi Kampus di wilayahnya, Organ Gerakan diKampus; (10) Departemen-departemen dalam PK dapat mengacu lembaga yang terdapat pada PB PMII; (11) Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada rayon-rayon dibawah kordinasinya; (12) Ketua PK dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat (RTK); (13) Ketua memilih Sekretaris, dan menyusun PK selengkapya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam; (14) Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode PK; (15) Persyaratan Pengurus Komisariat: (a) Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD; (b) Pernah aktif di kepemimpinan rayon minimal satu periode; (c) Mendapat rekomendasi dari rayon bersangkutan, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.

Sebagaimana diatur dalam AD, ART PMII, Konsentrasi penuh Pengurus Komisariat semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada rayon-rayon dibawah kordinasinya .Dengan demikian, Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki struktur pengurus yang juga disamakan dengan AD, ART PMII yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Internal, Ketua Bidang Eksternal dan Ketua Kajian Gender dan Emansipasi Perempuan, Sekretaris sebanyak 3 (tiga), Bendahara dan Wakil Bendahara⁹.

Di Bidang Internal meliputi: Kaderisasi dan Pembinaan Sumber Daya Anggota, Pendayagunaan Aparatur dan Potensi Organisasi, dan Kelembagaan serta Kajian Intelektual. Sedangkan Bidang Eksternal meliputi: Komunikasi dengan Pihak Instansi Kampus dan semua elemen Organisasi Kemahasiswaan (baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus)¹⁰.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di UIN Sunan Ampel, pada dasarnya adalah bagian dari struktur organisasi PMII

⁸Wawancara eksklusif dengan Dzakir Ahmad, Ketua PMII Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal 28 Mei 2016.

⁹*Ibd.*

¹⁰*Ibid.*

PK. PMII UIN dalam hal ini memiliki struktur kepemimpinan yang sangat komperhensif. Sesuai dengan amanah AD/ADT PMII, PK. PMII UIN dinahkodai oleh seorang Ketua. Dalam menjalankan amanah organisasi, Ketua tersebut dibantu dengan beberapa orang yang mengbidangi struktur- struktur yang sudah di tetapkan dan disepakati dalam forum tertinggi ditingkat PK.PMII yaitu Rapat Tahunan Komisariat (RTK).¹³

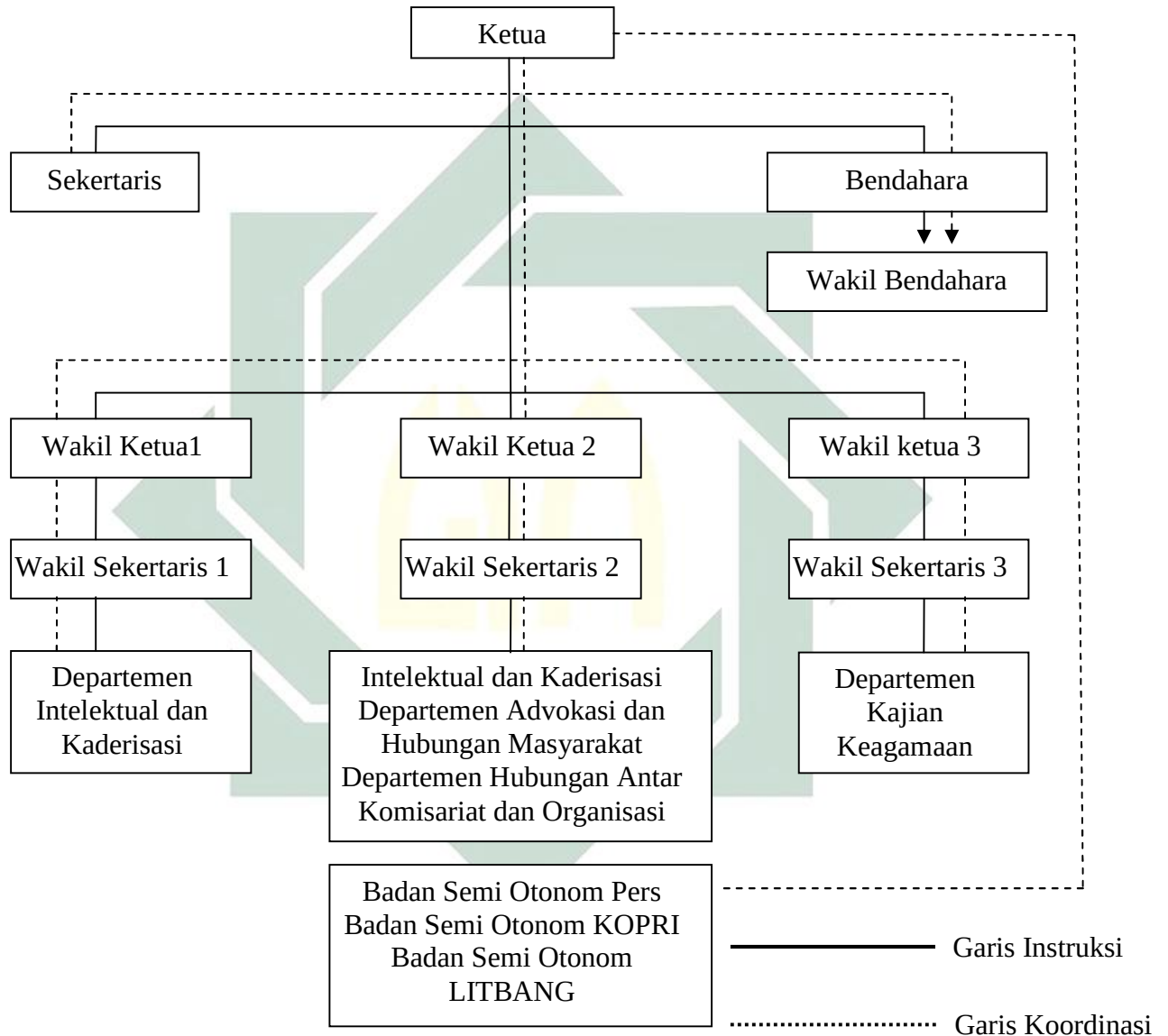
¹²Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016.

13. BAB VII, Permusyawaratan, Pasal 8, Anggaran Dasar (AD) PMII. Permusyawaratan dalam Organisasi terdiri dari : Kongres, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas), Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab), Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspinda), Musyawarah Kerja Koordinator Cabang (Muker Korcab), Konferensi Cabang (Konfercab), Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspincab), Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Tahunan Komisariat (RTK), Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Kongres Luar Biasa (KLB), Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB), Konferensi Cabang Luar Biasa (konfercab LB), Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB), Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

Adapun Departemen Intelektual dan Kaderisasi di bawah koordinasi Wakil Ketua 1 dan Wakil Sekretaris 1. Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat serta Departemen Hubungan Antar Komisariat dan Organisasi berada di bawah koordinasi Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris 2 bidang eksternal. Departemen Kajian Keagamaan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua 3 dan Wakil Sekretaris 3.

¹⁴Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016.

Struktur Organisasi Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya



2. Infrastruktur Organisasi

Sebagaimana layaknya organisasi secara umum. Dalam hal tata kelola organisasi, dibutuhkan pula infrastruktur yang memadai. Sebagaimana pengamatan dan kunjungan peneliti, Pengurus

Adapun infrastruktur yang dimaksudkan adalah: adanya basecamp atau kantor organisasi, alat tulis kantor (ATK), papan pengumuman, papan struktur organisasi. Kantor Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel berada di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari no. 143 Kecamatan Wonocolo- Surabaya. Lokasi kantor tersebut sangat mudah di jangkau dari segala penjuru arah. Tepatnya di Gang Lebar (jalan yang menghubungkan aktifitas mahasiswa UIN secara umum).

1. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
2. Drs. H. A. Hamid Syarif
3. Drs. H. Muhammad Achyar, M.Psi
4. Drs. Ibnu Anshori, SH, MA

[illegible]

Terbukti, disetiap fakultas yang ada di UIN Sunan Ampel, mahasiswa yang mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA)¹⁷ sangat banyak, dan hampir mayoritas mahasiswa baru, akan tertarik mengikuti prosesi pelatihan tersebut. Adapun manual jumlah kader dapat dilihat di bawah ini:

Jumlah Kader PMII UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya

No	Rayon	Angkatan	MAPABA	PKD
01	Adab	2013	135	137
		2014	180	157
		2015	170	160
02	Dakwah	2013	179	160
		2014	150	155
		2015	180	178
03	Syari'ah	2013	176	170
		2014	191	168
		2015	156	150
04	Tarbiyah	2013	67	66
		2014	53	50
		2015	56	48
05	Ushuludin	2013	154	153
		2014	135	133
		2015	163	160
Total General		2013	711	686
		2014	709	663

[illegible]

	2015	725	696
--	------	-----	-----

B. Proses Komunikasi Organisasi PMII dalam Membentuk Kader Insan

Ulul Albab

Sebagaimana diungkapkan di atas, Deddy Mulyana mengemukakan lingkup kajian komunikasi organisasi (*organization communication*) sebagai berikut: komunikasi organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar-pribadi dan ada kalanya juga komunikasi public. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gossip.

Di PMII secara umum juga memiliki lingkungan komunikasi organisasi yang sama yaitu adanya komunikasi formal dan informal. Dalam komunikasi formal, PMII memiliki struktur mulai dari Pusat sampai pada tingkat Fakultas di Perguruan tinggi. Adapun struktur kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut: Ditingkat pusat Pengurus Besar (PB PMII), ditingkat regional ada Pengurus Koordinator Cabang (PKC PMII), ditingkat kota atau kabupaten adalah Pengurus Cabang (PC PMII), ditingkat kampus atau

1. Kaderisasi Formal Basic; adalah jenjang kaderisasi formal di PMII yang harus dilalui oleh setiap kader PMII. Adapun jenjang proses kaderisasi formal tersebut adalah: Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL). Seperti yang diungkapkan Dzakir Ahmad selaku Ketua Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya

“Pengkaderan di PMII itu ada MAPABA, PKD dan PKL, akan tetapi PKL dilaksanakan oleh pengurus cabang, kegiatan MAPABA itu biasanya dilakukan diluar kampus, kegiatan itu bertujuan mengenalkan anggota terhadap PMII maka dari itu, materi yang diberikan bersifat doktrin. Selanjutnya setelah 6 bulan MAPABA, anggota akan melakukan kegiatan PKD (pelatihan kader dasar), kegiatan PKD adalah proses diangkatnya anggota menjadi kader.”¹⁸

2. Kaderisasi Informal; adalah jenjang kaderisasi yang harus senantiasa melibatkan kader dalam setiap aktifitas PMII baik sebagai peserta, panitia (*Organizing Committee* dan *Sterring Committee*) atau pun sebagai penanggung jawab kegiatan. Kaderisasi ini lebih condong mengolah *basic* psikomotorik dan *skill* yang dimiliki kader. Kader akan ditempa menjadi

[illegible]

3. Kaderisasi Non Formal; adalah proses kaderisasi non formal yang identik dengan pengkayaan wacana dan pengembangan potensi kader. Proses kaderisasi ini biasanya berbentuk pelatihan-pelatihan dan sekolah yang telah dirumuskan oleh pengurus PMII. Selain itu, ada pula yang berbentuk *Focus Group Discourse* (FGD), *Small Group Discusion* sampai dengan diskusi warung kopi. Dalam proses kaderisasi non formal kader diberikan materi bersifat wajib atau pilihan. Materi yang bersifat wajib seperti sekolah *gender* dan sekolah ASWAJA. Sedangkan yang bersifat pilihan adalah yang mendukung perkuliahan, seperti sekolah filsafat, dan sosiologi.

“Dalam proses kaderisasi non formal, kader diberikan materi bersifat wajib atau pilihan, untuk memperbanyak wawasan dan pengembangan potensi kader. Biasanya proses kaderisasi non formal ini kita lakukan di kampus saat sore hari atau biasanya dengan ngopi bareng, supaya bisa lebih dekat dengan pengurus.”

Dilihat dari dimensi komunikasi organisasi, PMII juga memiliki struktur kepengurusan baik di bidang internal maupun eksternal. Di Bidang Internal meliputi: Kaderisasi dan Pembinaan Sumber Daya Anggota,

Pendayagunaan Aparatur dan Potensi Organisasi, dan Kelembagaan serta Kajian Intelektual. Sedangkan Bidang Eksternal meliputi: Komunikasi dengan Pihak Instansi Kampus dan semua elemen Organisasi Kemahasiswaan (baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus).

Dari sini, secara organisasi dapat disimpulkan bahwa PMII juga telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam komunikasi organisasi. Selain itu, PMII juga telah mampu menggerakkan element strukturalnya menjadi satu kesatuan yang dinamis dengan pola dan mekanisme system komunikasi yang dibangun.

1. Proses Komunikasi

Dalam tata kelola organisasi, membutuhkan management organisasi. Begitu pula dengan Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel Surabaya.

“Untuk mengelola organisasi ditingkat perguruan tinggi kali ini, para pengurus lebih memaksimalkan kerja-kerja organisatoris yang di dasarkan pada prinsip kekeluargaan dan profesionalitas sehingga dapat menjadikan Komunikasi yang baik disetiap anggotanya.”¹⁹

Dalam komunikasi juga membutuhkan musyawarah demi mendapatkan hasil mufakat dari anggota organisasi. Begitu pula yang dilakukan oleh pengurus komisariat PMII.

¹⁹Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016.

“Begitu pula dengan proses pengambilan kebijakan, selalu saja dikedepankan system musyawarah mufakat dengan melibatkan segenap pengurus yang ada.”²⁰

Sesuai dengan amanah organisasi, dalam me- manage organisasi ini, Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel telah melakukan beberapa fungsi dan kinerja organisasi.

“Fungsi dan kinerja organisasi tersebut antara lain: *Planing*, Yang dimaksud *planning* disini adalah merencanakan berbagai macam agenda program kerja selama satu periode. Kegiatan Rapat Kerja (Raker) kepengurusan dilaksanakan setelah prosesi pelantikan Pengurus Komisariat Sunan Ampel oleh Pengurus Cabang PMII Surabaya. *Organizing*, Proses ini disesuaikan dengan Garis- Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) PMII. Sebagaimana termaktub di dalamnya, Ketua Komisariat bertugas dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan PMII di tingkat Komisariat. Selain itu, menandatangani surat- surat yang telah dibuat oleh PMII di tingkat Komisariat.”²¹

Diatur dalam Garis- Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) PMII, Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Ampel telah melakukan beberapa fungsi dan kinerja organisasi. Seperti yang diungkapkan Dzakir Ahmad dalam fungsi dan kinerja anggotanya.

“Sekretaris Komisariat bertugas bersama- sama Ketua Komisariat bertanggung jawab terhadap segenap aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisariat. Membuat kerangka kerja yang bersifat administratif serta bersama- sama Ketua Komisariat, menandatangani segala surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Komisariat. Bendahara, membantu Ketua Komisariat dalam hal

²⁰Wawancara dengan Dzakir Ahmad, 27 mei 2016, format pengambilan keputusan dalam hal ini melalui mekanisme rapat dengan komponen kepengurusan dan apa pun hasil yang diperoleh dari rapat tersebut harus dilaksanakan sebagai satu bentuk kesepemahaman bersama.

²¹ Wawancara dengan Dzakir Ahmad, 27 mei 2016, satu periode dalam kepengurusan di tingkat Komisariat yaitu selama satu tahun, berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya oleh Pengurus Cabang Surabaya.

mengetahui Ketua Komisariat. Wakil Sekretaris 2, ber-
Wakil Ketua 2 dan Ketua Komisariat bertanggung
melaksanakan agenda dan atau kegiatan yang bersifat
Bersama dengan Wakil Ketua 2 menandatangani surat-
yang bersifat eksternal dengan mengetahui Ketua
Wakil Ketua 3 bertugas, bersama- sama Ketua
bertanggungjawab dan melaksanakan agenda dan a
yang bersifat keagamaan. Wakil Sekretaris 3, ber-
dengan Wakil Ketua 3 menandatangani surat- surat
bersifat keagamaan dengan mengetahui Ketua Komis
Bendahara, bersama- sama dengan Bendahara Komisar
sirkulasi keuangan Komisariat. Departemen Inte

kinerjanya. Proses yang ketiga itu *Evaluating*. Dalam manual Program Kerja Kepengurusan, fungsi evaluasi Pengurus Komisariat Sunan Ampel Surabaya, dilaksanakan setiap 3 bulan sekali secara berkala. Dimaksudkan untuk maksimalisasi kinerja kepengurusan dalam menjalankan amanah organisasi. Selain itu, tenggang waktu 3 bulan dianggap sangat ideal dalam melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang sudah dan atau akan dilaksanakan. Dengan demikian, proses kepengurusan akan stabil dengan adanya fungsi evaluasi kali ini.”²³

2. Proses Pengkaderan

1. Kaderisasi Formal

Kondisi kaderisasi di Komisariat PMII UIN termasuk sangat tertib dan dinamis. Hal tersebut dibuktikan dengan masifnya sistem kaderisasi yang ada di Komisariat PMII UIN Sunan Ampel. Baik kaderisasi formal, in formal, maupun non formal berjalan dengan maksimal. Hal ini dikuatkan oleh AUFAR MAJID, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

“Berbeda dengan komisariat- komisariat yang ada di lingkungan PMII Cabang Surabaya yang lain, proses pelaksanaan kaderisasi formal (MAPABA dan PKD) di Komisariat UIN Sunan Ampel sudah dilaksanakan oleh Pengurus Rayon.”²⁴

Selain pertimbangan kuantitas kader yang sedemikian besar, kondusifitas pelatihan juga menjadi bahan pertimbangan. Hal ini

²³ Wawancara dengan Dzakir Ahmad, tanggal 30 mei 2016

²⁴ Hal ini dikuatkan oleh AUFAR MAJID, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016. Dalam proses tersebut, dikarenakan kuantitas kader yang sedemikian besar, sehingga tidak memungkinkan jika pelaksanaan kaderisasi formal tersebut dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat. Selain itu, pertimbangan maksimalisasi proses kaderisasi di Rayon sangat efektif dikarenakan ada pola hubungan primordial fakultatif yang masih kental di UIN Sunan Ampel Surabaya.

dikuatkan oleh Aufar Majid, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

“Proses kaderisasi tersebut lebih efektif jika dilaksanakan oleh Pengurus Rayon. Dalam upaya menjaga ritme, efektifitas, dan efisiensi pelatihan, para Pengurus Rayon akan membentuk kepanitiaan yang terbagi menjadi 2, Sterring Commite (SC) dan Organizing Commite (OC). Kedua bentuk kepanitiaan dibawah kontrol Pengurus Rayon dan Pengurus Komisariat.”²⁵

Adapun tugas dari SC adalah mengkonsep bentuk pelatihan, metode yang dipakai, serta membahas dan mempelajari secara maksimal materi- materi yang akan disajikan dalam pelatihan tersebut. Dalam SC sendiri, ada beberapa struktur yang di bagi menjadi beberapa bagian. Ada Manager SC yang bertugas mengonsep, mengorganisir, dan menjalankan tahapan- tahapan proses sebelum pelatihan dilaksanakan. Kemudian, dia dibantu oleh Koordinator All Materi, yang bertugas memahami, mempelajari semua materi yang akan disampaikan, serta mengorganisir koordinator per materi.

Dikuatkan oleh Aufar Majid departemen intelektual dan kaderisasi.

“Dibawah Koordinator All Materi, ada koordinator per materi yang bertugas memahami, mempelajari masing- masing materi yang akan disampaikan dalam sebuah pelatihan.”²⁶

²⁵Wawancara dengan Aufar Majid, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016. Pembagian format kepanitiaan tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan kepanitiaan dan wilayah kerja yang di bagi sesuai dengan job discription masing- masing kepanitiaan.

²⁶Wawancara dengan Aufar Majid, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

Setelah melaksanakan Studium General (SG), tugas selanjutnya dari SC adalah mengkaji secara berkala, materi- materi yang akan disampaikan, tanpa ada batasan reverensi (baca: pengkayaan wacana). Setelah proses itu dianggap cukup, SC harus melakukan Training of Trainer (ToT). Dijelaskan oleh Aufar Majid terkait proses TOT.

²⁷ Wawancara dengan Auffer Majid, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016, schedule yang dimaksud disini ada 2 macam. Ada schedule proses yang akan mengkonsep berjalannya proses SC sebelum pelatihan, ada schedule pelatihan yang memformat kegiatan- kegiatan yang dilakukan mulai dari awal pemberangkatan peserta sampai penutupan acara pelatihan.

²⁸ Ibid, dikuati pula dengan pernyataan Khoiron Katsir, Ketua Rayon PMII Dakwah Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya, Asal Madura, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, Angkatan Masuk Tahun 2012, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

Demikianlah proses pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas kader benar- benar ditempa. Selain mengasah basic kognitif, ranah afektif dan psikomotorik benar- benar menjadi perhatian. Dengan hal ini, kader bisa dikatakan akan siap ditempatkan disetiap kondisi dan situasi pelatihan model apa pun. Karena sudah dianggap lulus dalam seleksi menjadi seorang SC disetiap pelatihan yang dilaksanakan oleh PMII.

Table 2.1
Manual Pra Kegiatan Kaderisasi Formal

No	Kegiatan	Materi dan Pembahasan	Tujuan	Penanggung Jawab
01	Studium General (SG)	Membedah makna sebuah pelatihan, menganalisis kondisi obyektif SC, menganalisis kondisi calon peserta yang akan dihadapi, serta menentukan <i>schedule</i> proses.	Agar SC faham tentang makna dan filosofi pelatihan. SC mengetahui kondisi obyektif SC dan kondisi obyektif calon peserta pelatihan,	SC Pengurus Rayon Pengurus Komisariat

			serta terwujudnya <i>schedulle</i> proses	
02	Training of Trainer 1 (ToT 1)	Mengkaji teknik-teknik kefasilitatoran, psikologi forum, dan komunikasi massa.	SC mengetahui teknik-teknik kefasilitatoran. SC mengetahui teori tentang psikologi forum dan komunikasi massa.	SC Pengurus Rayon Pengurus Komisaria
03	Training of Trainer 2 (ToT 2)	pembuatan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengkaderan (RPP) serta langsung praktek pembuatan silabus	SC merumuskan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengkaderan (RPP). Terciptanya	SC Pengurus Rayon Pengurus Komisariat

		tersebut sehingga konsep pelatihan semakin jelas, dan Shedulle Pelatihan.	pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien.	
04	Training of Trainer 3 (ToT 3)	Simulasi Pelatihan	SC mengetahui alur pelatihan dan sekaligus praktek.	SC Pengurus Rayon Pengurus Komisariat

Sebagaimana disebutkan di atas, kepanitiaan yang lain adalah Organizing Commite (OC). Tugas yang dilaksanakan oleh OC sangat jauh berbeda dengan yang dilaksanak oleh SC. Dijelaskan oleh Udin wakil ketua 1.

“OC sebagai pelaksana teknis. Segala persiapan yang bersifat teknis, harus dilaksanakan oleh OC. Kinerja yang dilaksnakan oleh OC pertama, mencari dana untuk kesuksesan sebuah pelatihan. Kedua, mempersiapkan sarana dan pra sarana. Ketiga, mempersiapkan team ceremonial.”²⁹

Melihat tugas yang diemban oleh OC sedemikian besar, maka dalam proses ini dibutuhkan pembagian struktur yang bertugas di

²⁹Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Usuludin, AngkaKondisi Kaderisasitan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei2016.

masing- masing bagiannya. Dijelaskan oleh Udin wakil ketua 1 dalam struktur kepanitiaan OC.

“Struktur dalam kepanitiaan OC yakni ada Manager OC (Ketua Panitia) dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara. Bertugas mengorganisir kepanitiaan OC dalam setiap momentum pelatihan. Selain itu, juga membuat schedule proses untuk OC. Mereka bertiga, dibantu oleh bidang- bidang. Ada Sie Kesekretariatan yang bertugas di wilayah teknis surat menyurat. Sie Pendanaan, bertugas mencari dana sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Sie Rekrutmen yang bertugas melaksanakan proses rekrutment peserta pelatihan. Sie Dokumentasi, Publikasi, dan Akomodasi (DPA) yang bertugas menyediakan sarana dan pra sarana pelatihan ditambah dengan dokumentasi pelatihan. Sie Konsumsi, bertugas di wilayah dapur dalam upaya mempersiapkan konsumsi dan kebutuhan pelatihan. Sie kesehatan, bertugas ketika dalam pelatihan ada peserta yang terkena penyakit dan harus di beri pengobatan. Dan Sie Acara, bertugas sebagai pelaksana acara- acara ceremonial (pembukaan dan penutupan pelatihan).”³⁰

Demikian struktur kepanitiaan di setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh PMII di Komisariat UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya. Hal ini yang kemudian dilaksanakan dan menjadi tradisi di setiap level dan jenjang pengkaderan di PMII Komisariat UIN Sunan Ampel. Inilah “kawahcandradimuka” bagi kader yang ingin serius menempa dan menimba pengalaman di luar basic disiplin keilmuan fakultatif dunia perkuliahan.

“Proses ini yang harus ditempuh oleh kader sebagai bagian dari proses kaderisasi In Formal, melibatkan kader dalam segenap aktifitas PMII. Tugas dari Pengurus Rayon dan Pengurus Komisariat hanya sebatas mengarahkan, memotivasi, dan

³⁰Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Usuludin, AngkaKondisi Kaderisasitan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei2016.

membimbing pelaksanaan proses tersebut. Dengan demikian, fungsi organisasi akan berjalan dengan maksimal.”³¹

Setelah kedua proses kepanitian sudah dianggap maksimal oleh masing- masing Pengurus Rayon dan Pengurus Komisariat, baru kemudian menuju pelaksanaan pengkaderan. Dalam pelaksanaan pengkaderan di PMII yang pertama kali yaitu MAPABA, Pengurus Rayon dan Pengurus Komisariat UIN Sunan Ampel akan bahu membahu untuk melaksanakan proses doktrinasi dan ideologisasi sebagai kerangka awal mahasiswa masuk menjadi kader PMII Komisariat UIN Sunan Ampel. Diperkuat oleh Udin.

“MAPABA Dilaksanakan secara bergiliran oleh semua pengurus rayon yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun waktu pelaksanaannya adalah setelah mahasiswa baru masuk dan mengenyam pendidikan di kampus selama 1-2 bulan. Hal ini sebenarnya tidak ada aturan baku dalam konstitusi PMII. Namun, hal tersebut sudah menjadi budaya kaderisasi di PMII Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya.”³²

Kegiatan yang dilaksanakan di MAPABA sangat variatif dan dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Namun, dalam hal materi yang disajikan, ada beberapa materi yang bersifat baku-doktriner. Hal ini dikarenakan dalam proses kaderisasi ini, adalah awal bagi mahasiswa untuk dapat diakui sebagai kader. Adapun materi- materi tersebut adalah Sejarah Ke-PMII-an, Aswaja, Konstitusi PMII, dan Nilai- Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Keempat materi di atas, bersifat

³¹ Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi.

³² Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi.

baku-doktriner. Kalaupun ada perubahan, hanya dapat dilaksanakan dalam forum tertinggi PMII yaitu Kongres yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar PMII (PB PMII). Dikuati oleh pernyataan Aufar Majid.

“Selain empat materi yang bersifat doktriner, ada beberapa materi muatan lokal (suplemen) yang diberikan di MAPABA. Materi-materi tersebut adalah: Ke-Islam-an, Ke-Indonesia-an, dan Antropologi Kampus.”³³

Materi- materi suplemen ini yang kemudian dapat memberikan informasi dan ilmu tambahan seputar wawasan keislaman dan kebangsaan kepada peserta MAPABA.

Adapun metode penyampaian materi dalam MAPABA dibagi menjadi 2 yaitu: untuk materi yang bersifat doktriner, menggunakan metode Paedagogik. Sedangkan materi suplemen, menggunakan metode Andragogik. Ada pula, dalam beberapa materi, disusupkan beberapa metode penyampaian diantaranya: ceramah, tanya jawab, sosio drama, dan role playing. Metode- metode itu, dirumuskan oleh SC MAPABA dalam forum ToT 2 ketika membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengkaderan (RPP). Wawancara dengan Khoiron Katsir, Ketua Rayon PMII Dakwah Komisariat UIN Sunan

³³ *Ibid*, dikuati oleh pernyataan Aufar Majid, Departemen Intelektual dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.. Bahwa, kisi- kisi materi ke- Islam-an yang di sampaikan dalam MAPABA berkuat hanya seputar Sejarah Kebudayaan Islam dan Golongan- golongan keagamaan yang ada didalam Islam. Kisi- kisi materi Ke- Indonesia-an di momentum MAPABA, disesuaikan dengan wacana yang berkembang sesuai dengan disiplin fakultatif masing- masing Rayon. Kisi- kisi materi Antropologi Kampus adalah Good Goverment, Konsep Nasionalisme dan Patriotisme, serta Gerakan Mahasiswa.

Ampel Surabaya, Asal Madura, Fakultas Dakwah, Jurusan Managemen Dakwah, Angkatan Masuk Tahun 2012, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

“Dalam doktrinasi dan ideologisasi, kiranya tepat menggunakan metode tersebut. Karenakan materi muatan lokal masih bersifat dialektis dan dinamis. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberi stimulus bagi peserta untuk mengembangkan wacana-wacana ke- Islam-an dan ke-Indonesia-an. Selain itu, dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan kader terhadap wacana ke-Islam-an dan kebangsaan. dengan harapan agar pelatihan tidak monoton sehingga membuat peserta menjadi jenuh, serta membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang di buat oleh PMII dikemudian hari.”³⁴

Pelaksanaan MAPABA diakhiri dengan pengambilan sumpah bai’at peserta MAPABA menjadi Anggota PMII oleh Pengurus Cabang.³⁵ Setelah prosesi pengambilan sumpah bai’at, peserta sudah dinyatakan sah menjadi anggota PMII. Tidak berhenti di MAPABA, seorang anggota juga harus mengikuti Follow Up MAPABA. Follow up disini, juga dilaksanakan oleh para Pengurus Rayon. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berfariatif sesuai dengan kebutuhan anggota dimasing- masing rayon. Di Rayon Dakwah, follow up pasca MAPABA adalah diskusi fakultatif (sesuai dengan jurusan masing-

³⁴ Khoiron Katsir, Ketua Rayon PMII Dakwah Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya, Asal Madura, Fakultas Dakwah, Jurusan Managemen Dakwah, Angkatan Masuk Tahun 2012, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016,

³⁵ Anggaran Dasar (AD) PMII, Bagian II, Penerimaan Anggota, Pasal 4, Ayat 2. Dikuatkan pula oleh Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016.

Dalam hal ini proses pengkaderan formal yang kedua bersifat wajib diikuti anggota, dikarenakan dalam proses ini anggota akan dibaiat sebagai seorang kader. Dijelaskan oleh Udin wakil ketua 1 bidang internal dan kaderisasi.

³⁸ Kader Mujahid yang dimaksud disini adalah kader yang “bersungguh- sungguh” dalam mengemban amanah Islam nusantara dan kebangsaan, bukan kader Bomber seperti yang akhir- akhir ini menggema di belantika keislaman nusantara. Disampaikan oleh Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016.

Analisa Media, Managemen Aksi, Community Organizer (CO), Keislaman, dan Keindonesiaan.”³⁹

Sebenarnya ada satu lagi model kaderisasi formal, yaitu Pelatihan Kader Lanjut (PKL). Namun, yang dapat menyelenggarakan pelatihan tersebut adalah pengurus Cabang atau pengurus Koordinator Cabang. Pengurus Komisariat tidak diperbolehkan menyelenggarakan model kaderisasi tersebut, dikarenakan beban materi yang disampaikan lebih berat dibandingkan dengan Pelatihan Kader Dasar.⁴⁰ Dua model kaderisasi formal tersebut di atas dilaksanakan tiap tahun oleh pengurus baik di tingkat Komisariat maupun ditingkat Rayon di lingkungan UIN Sunan Ampel. Demikian rentang panjang kaderisasi formal di PMII Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam hal ini, peneliti dapat mengambil sebuah simpulan bahwa, kaderisasi formal di PMII Komisariat UIN Sunan Ampel sudah dapat berjalan sebagaimana amanah organisasi secara umum. Dan dapat dibilang bahwa proses kaderisasi di PMII UIN sudah sangat ideal menjadi standart kaderisasi nasional.

2. Kaderisasi In Formal

Perlu diingat terlebih dahulu bahwa, yang dinamakan kaderisasi in formal adalah proses kaderisasi yang melibatkan kader

³⁹Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Usuludin, AngkaKondisi Kaderisasitan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei2016.

⁴⁰*Ibid*, dikuatkan pula dengan hasil Kongres PMII, Komisi Bidang Kaderisasi dan Pengorganisiran Basis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 2011.

“Proses pelibatan kader, tidak hanya menjadikan kader menjadi obyek sebuah kegiatan itu saja. Namun, lebih dari itu, mereka juga bertindak sebagai subyek. Menjadi subyek disini turut melibatkan kader dalam proses- proses kepanitiaan. Kepanitiaan di PMII Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya dibagi menjadi 2 yaitu Sterring Commite (SC) dan Organizing Commite (OC). Pembagian kepanitiaan ini dititik beratkan pada pola kinerja kedua kepanitiaan tersebut.”⁴⁴

⁴²Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Mei 2016. Kegiatan dan program kerja yang dimaksud diantaranya: pelatihan- pelatihan (MAPABA, PKD, pelatihan kepemimpinan, sekolah aswaja, sekolah analisis sosial,dll), seminar, bedah buku, workshop, halaqoh- halaqoh, diskusi rutin, diba'iyah dan tahlil bersama, istighosah, dan masih banyak lagi yang lainnya.

⁴⁴Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Usuludin, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 28 Mei 2016.

Dari sini sudah dapat kita lihat bahwa, proses kaderisasi in formal yang dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat PMII UIN, tidak hanya berkuat dan melibatkan kader sebagai obyek dari pada kegiatan tersebut, namun juga menjadikan kader sebagai subyek. Dengan demikian, kader dapat merealisasikan berbagai macam perangkat skill yang telah di dapatkan di beberapa pelatihan yang ada di PMII. Pengembangan diri kader akan semakindapat diukur dengan tidak hanya membekalnya di sisi kognitif saja, terlebih dari itu, basic afektif dan psikomotoriknya juga tergarap.

Kaderisasi non formal adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. Perkaderan jenis ini dibedakan dalam dua macam, yakni yang wajib diikuti oleh segenap kader secara mutlak dan yang wajib diikuti sebagai pilihan. Yang sifatnya wajib mutlak, disamping sebagai pembekalan mengenai hal-hal dasar yang

[illegible]

“Dimana setelah PKD, kader dituntut dapat beradaptasi dengan berbagai macam pola dan kultur dalam masyarakat. Selain itu, pelatihan dan atau sekolah yang dimaksudkan di atas adalah sebagai perangkat atau alat bagi kader dalam penempatan proses selanjutnya.”⁴⁷

4. Pembentukan Insan Ulul Albab

⁴⁷ *Ibid.*

1. Materi- Materi Kaderisasi

Dalam materi Aswaja, kisi- kisi yang disampaikan adalah Aswaja sebagai *Madzhabi*, sebagaimana didalamnya dijelaskan kerangka historis lahirnya faham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, ketetapan imam dalam wilayah aqidah, fiqh, dan tasawwufnya. Dijelaskan oleh Dzakir Ahmad ketua komisariat.

“Karena PMII lahir dari rahim Nahdlatul Ulama’ (NU) maka dalam konsepsi Aswaja sebagai Madzhabi, PMII tidak bisa lepas dari NU. Dalam kerangka aqidah, masih tetap mengikuti Imam Abu Hasan Al- Asy’ari dan Abu Mansyur al- Maturidy. Dalam wilayah fiqh menganut 4 imam yaitu Hanafi, Syafi’I, Maliki, dan Hambali. Dalam wilayah tasawwuf, mengikuti Imam Al- Ghozali dan Imam Junaid al- Baghdadi.”⁴⁸

Selain itu, Aswaja disajikan sebagai kerangka Manhaji.

[illegible]

Sebagaimana dikenal secara umum, konsep Aswaja di PMII dijadikan sebagai Manhaj al- Fikr.

“Manhaj al- fikr di PMII dijelaskan sebagai metodologi berfikir. kerangka berfikir kader PMII dituntut untuk turut serta menggunakan konsep Aswaja. Aswaja diposisikan tidak hanya sebagai kerangka *madzhabi* yang bersifat doktriner dan kaku. Namun, Aswaja ketika dijadikan sebagai *Manhaj*, akan bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kondisi *zaman* (waktu) dan *makan* (tempat) dimana PMII berada.”⁴⁹

Adapun nilai- nilai Aswaja yang harus dijadikan sebagai kerangka berfikir tersebut adalah Tawassud (mengambil jalan tengah), *Tasammuh* (toleran), *Tawazzun* (seimbang), dan *Ta’addul* (adil).

Materi selanjutnya yang berimplikasi pada proses pembentukan insan ulul albab yaitu Nilai- Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti kemerdekaan (*al-hurriyyah*), persamaan (*al-musawa*), keadilan (*’adalah*), toleran (*tasamuh*), damai (*al-shuth*), dan ke Indonesiaan (pluralisme suku, agama, ras, pulau, persilangan budaya) dengan kerangka paham *ahlussunah wal jama’ ah* yang menjadi acuan dasar pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi.⁵⁰

NDP merupakan pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit serta elan vital pergerakan yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Dakwah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

NDP Memiliki tiga fungsi, yaitu: Pertama, Kerangka Refleksi. Sebagai kerangka refleksi NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat level kebenaran-kebenaran ideal. Subtansi ideal tersebut menjadi suatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus ruang dan waktu (*muhlamul qat'i*) kerangka refleksi ini menjadi moralitas gerakan sekaligus sebagai tujuan absolut dalam mencapai nilai-nilai kebenaran, kemerdekaan, kemanusiaan.⁵³

⁵¹ *Hand Out Materi* MAPABA 2015 PMII Rayon Syari'ah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.

53 *ibid*

senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah. Kerangka aksi ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat dan bahkan memperbaharui rumusan kebenaran historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah.⁵⁴

Ketiga, Kerangka Ideologis. Kerangka ideologis menjadi rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi disetiap kader, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses progressif dalam perubahan sosial. Kerangka ideologis juga menjadi landasan pola pikir dan tindakan dalam mengawal perubahan sosial yang memberikan tempat pada demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁵⁵

Dalam hal ini, kedudukan NDP adalah: Pertama, NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas pergerakan. Kedua, NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap, bertindak dalam aktivitas pergerakan. Adapun rumusan NDP adalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Didalamnya terkandung hakikat

⁵⁴ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Ushuluddin UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

⁵⁵ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Adab UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

kebenaran manusia. (Al-Ikhlâs, Al-Mukmin: 25, Al-Baqarah: 130-131).⁵⁶

b. Hubungan Manusia dengan Allah

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia sebaik-baik kejadian dan menempatkan pada kedudukan yang mulia. Kemuliaan manusia antara lain terletak pada kemampuan berkreasi, berfikir dan memiliki kesadaran moral. Potensi itulah yang menempatkan posisi manusia sebagai khalifah & hamba Allah (Al-Anam:165, Yunus: 14).⁵⁷

c. Hubungan Manusia dengan Manusia

Allah meniupkan ruh dasar pada materi manusia. Tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaannya (Al-Hujurat:13). Pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap kritis dalam kerangka religiusitas. Hubungan antara muslim dan non-muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia tanpa mengorbankan keyakinan terhadap kebenaran universalitas Islam.⁵⁸

d. Hubungan Manusia dengan Alam

⁵⁶ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Tarbiah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

⁵⁷ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Dakwah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

⁵⁸ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Tarbiah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

NDP oleh PMII dipergunakan sebagai landasan teologis, normative dan etis dalam pola pikir dan perilaku. Dari dasar dasar pergerakan tersebut muaranya adalah untuk mewujudkan pribadi muslim yang berakhlaq dan berbudi luhur, dan memiliki konstruksi berfikir kritis dan progressif.

Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti motifasi, wawasan pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembeda terhadap apa saja yang akan mesti dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan. Insaf dan sadar bahwa semua ini adalah keharusan

⁶⁰ *ibid*

bagi setiap kader PMII untuk memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII tersebut, baik secara personal maupun secara bersama-sama, sehingga kader PMII diharapkan akan paham betul tentang posisi dan relasi tersebut.⁶¹

Posisi dalam arti, di diri kader sebagai manusia ada peran yang harus dilakukan dalam satu waktu sebagai sebuah konsekuensi logis akan eksistensi kader. Peran yang dimaksud adalah diri kader sebagai hamba, diri kader sebagai makhluk, dan diri kader sebagai manusia. Ketiga posisi di atas merupakan sebuah kesatuan yang koheren dan saling menyatu. Sehingga Relasi yang terbentuk adalah relasi yang saling topang dan saling menyempurnakan.⁶²

Akibat dari posisi tersebut maka akan muncul relasi yang sering diistilahkan sebagai *hablun mina Allah, hablun mina an-naas* dan *mu'amalah*. Dalam ihtiar untuk mewujudkan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa maka ketiga relasi di atas harus selalu dan selalu berangkat dari sebuah keyakinan IMAN, prinsip ISLAM, dan menuju IHSAN. Inilah yang nantinya akan menjadi acuan dasar bagi setiap warga pergerakan dalam melakukan segala ihtiar dalam segala posisi.

⁶¹ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Syari'ah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

⁶² *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Adab UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

Materi PKT banyak didasarkan pada teori- teori yang telah digagas oleh Hasan Hanafi, Mohammed Arkoun, Hegel, Immanuel Kahn, Karl Marx, dan Sigmunt Freud. Adapun kisi- kisi yang disampaikan adalah: arti paradigma, tiga jenis utama pradigma: Order Paradigm (Paradigma Keteraturan), Conflic Paradigm (Paradigma Konflik) Plural Paradigm (Paradigma plural), “kritik” menurut Kantian, Marxian, Hegelian, dan Freudian, proses tranformasi: Transformasi dari Elitisme ke Populisme, Transformasi dari Negara ke Masyarakat, Transformasi dari Struktur ke Kultur, Transformasi dari Individu ke Massa.⁶³

⁶³ *Hand Out Materi MAPABA 2015 PMII Rayon Tarbiah UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya.*

2. Proses Kaderisasi

“Dianggap sistematis karena proses kaderisasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat dasar (MAPABA), kemudian diteruskan dengan *follow up* setelah MAPABA dengan pelatihan dan atau sekolah yang bertujuan sebagai penunjang pengetahuan, wawasan, dan skill anggota. Setelah itu baru seorang anggota boleh mengikuti proses kaderisasi selanjutnya berupa PKD. Hal ini yang kemudian dianggap sebagai proses yang sistematis.”⁶⁴

⁶⁴ Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Mei 2016

kaderisasi PMII Komisariat UIN Sunan Ampel Cabang Surabaya bisa dikatakan sebagai proses yang terorganisir.”⁶⁵

3. Program Kerja Kepengurusan

Dalam konteks program kerja, pola pembentukan insan ulul albab yang dilaksanakan PMII Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya sangat variatif. Sebelum menetapkan program kerja, Pengurus Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya melakukan analisa terhadap kondisi internal. Selain itu, Pengurus juga melakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya. Setelah melakukan proses analisa dan evaluasi, baru kemudian merumuskan Rencana Strategis (Renstra).⁶⁶

Hasil renstra itu yang kemudian dijadikan sebagai acuan Pengurus dalam menentukan program kerja selama satu periode. Namun, perlu diketahui bahwa, ada program kerja yang bersifat wajib. Program kerja tersebut adalah Peringatan Hari Besar Islam dan Nasional (PHBI dan PHBN), Istighosah, Tahlil, Diba'iyah, dan diskusi. Dalam program kerja wajib inilah, Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya melakukan pembentukan mental kader insan ulul albab.

⁶⁵ Udin, Wakil Ketua 1 Bidang Internal dan Kaderisasi PK. PMII UIN Sunan Ampel, Fakultas Usuludin, AngkaKondisi Kaderisasitan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Mei 2016.

⁶⁶ Dzakir Ahmad, Ketua Umum PK. PMII UIN Sunan Ampel, Asal Madura, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Angkatan Masuk Tahun 2011, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Mei 2016